

**PENGUATAN KOLABORASI KAMPUS-DESA MELALUI FGD DAN
PENYUSUNAN *POLICY BRIEF* DI DESA RIAS BANGKA SELATAN**

***STRENGTHENING CAMPUS-VILLAGE COLLABORATION THROUGH FGD'S AND
POLICY BRIEF DEVELOPMENT IN RIAS VILLAGE SOUTH BANGKA***

Sandi^{1*}, Muhammad Tamimi², Evahelda³, Fournita Agustina⁴, Yudi Sapta Pranoto⁵
^{1,2,3,4,5}) Program Studi Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan, Universitas
Bangka Belitung

***Email korespondensi: sandiagro98@gmail.com**

Abstract

Rias Village possesses substantial potential in agriculture, fisheries, and biodiversity; however, its development governance faces challenges in evidence-based planning and community engagement. This study aimed to strengthen collaboration between higher education institutions and the village government through Focus Group Discussions (FGDs) and the formulation of a data-driven policy brief. The Participatory Rural Appraisal (PRA) method was employed to capture community aspirations and identify priority development issues. Findings indicate enhanced institutional capacity, the development of strategic policy recommendations on human resource development, data management, and local economic potential. The results underscore the effectiveness of the Triple Helix approach—integrating academia, government, and community—in promoting sustainable development governance at the village level.

Keywords: *Rias Village, FGD, Policy Brief, Village-University Collaboration, Participatory Development*

Abstrak

Desa Rias memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan sumber daya hayati, namun tata kelola pembangunan desa masih menghadapi tantangan dalam hal perencanaan berbasis bukti dan partisipasi masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa melalui pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dan penyusunan *policy brief* sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan berbasis data. Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) digunakan untuk menggali aspirasi masyarakat serta mengidentifikasi isu prioritas pembangunan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan desa, terbentuknya rekomendasi kebijakan strategis terkait penguatan SDM, tata kelola data pembangunan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Kegiatan ini memperlihatkan efektivitas sinergi *Triple Helix* antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Kata kunci: *Desa Rias, FGD, Policy Brief, Kolaborasi Desa–Kampus, Pembangunan Partisipatif.*



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2026 Author

Diterima: 26 Desember 2025; Disetujui: 8 Februari 2026; Terbit: 10 Februari 2026

PENDAHULUAN

Pembangunan desa pada era otonomi daerah menghadapi dinamika yang semakin kompleks, sehingga menuntut pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga berbasis pada bukti empiris (*evidence-based policy*). Pendekatan ini menegaskan pentingnya proses penyusunan kebijakan yang partisipatif, inklusif, serta berorientasi pada data sebagai dasar perencanaan pembangunan (Haryono & Wibowo, 2023). Dalam kerangka tersebut, perguruan tinggi memiliki fungsi strategis yang melekat melalui Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat (Nugraha & Fitriani, 2022).

Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang signifikan, terutama pada sektor pertanian yaitu beras terbesar di Babel. Desa Rias memiliki potensi surplus produksi yang besar dan berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Nopriansyah et al., 2021). Potensi ini membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan. Namun demikian, sebagian besar kebijakan pembangunan yang telah berjalan belum sepenuhnya berlandaskan analisis ilmiah yang komprehensif, sehingga resiko ketidaktepatan sasaran dan kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya masih cukup tinggi. Hal ini menegaskan perlunya intervensi program pengabdian masyarakat yang mengedepankan pendekatan kolaboratif, melalui pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dan penyusunan *policy brief* sebagai instrumen sistematis untuk mengidentifikasi isu strategis, merumuskan prioritas pembangunan, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan kontekstual. Dalam konteks tersebut, model kolaborasi *Triple Helix* yang mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kerangka kerja yang relevan dan efektif untuk memperkuat inovasi pembangunan desa. Kolaborasi ini terbukti mampu menciptakan ruang dialog, transfer pengetahuan, dan pembelajaran bersama yang mendukung lahirnya kebijakan pembangunan yang adaptif dan berbasis inovasi (Setianingrum et al.,

2024). Melalui kegiatan pengabdian ini, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia keahlian teknis, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengembangkan tata kelola pembangunan yang lebih ilmiah, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dukungan akademik yang diberikan berupa analisis situasi, fasilitasi pemangku kepentingan, dan penyusunan dokumen kebijakan menjadi kontribusi nyata perguruan tinggi dalam memperkuat pembangunan desa berbasis riset dan data.

METODE

Kegiatan dilaksanakan di Desa Rias pada tanggal 29 November 2025, melibatkan perangkat desa, kelompok tani, mahasiswa, dan Dosen Prodi Ilmu Pertanian Universitas Bangka Belitung yang membahas terkait mata kuliah problem khusus pertanian Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi Koordinasi awal dan penandatanganan *Implementing Agreement* (IA), *Focus Group Discussion* (FGD), penyusunan *Policy Brief*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat dalam aktivitas Tridarma Perguruan Tinggi adalah salah satu dari tiga pilar utama dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Tridarma sendiri terdiri dari tiga komponen yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya. Kegiatan pengabdian ini meliputi berbagai macam bentuk, seperti penyuluhan, pelatihan, konsultasi, pengembangan produk, dan layanan publik lainnya (Murdyantoro et al.,).

Tujuan dari tridarma pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat keterhubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat juga dapat menjadi salah satu indikator dalam penilaian kualitas perguruan tinggi oleh lembaga akreditasi dan masyarakat luas. Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, yang dikenal sebagai salah satu sentra

produksi padi dan lumbung pangan daerah. Desa Rias memiliki potensi surplus produksi yang besar dan berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Nopriansyah et al., 2021). Kolaborasi Kampus Desa dan Dampak Kelembagaan dengan *Focus Group Discussion* sangat penting untuk memetakan keterbatasan akan dukungan dan pengetahuan serta kebijakan dari pihak terkait dengan adanya penandatanganan IA kerja sama kampus dengan desa yang ditanda tangani oleh ketua Prodi MIP dan Kepala Desa Rias.

FGD memperkuat peran perguruan tinggi sebagai fasilitator pembangunan berbasis ilmu pengetahuan (Sulastri & Purnama, 2022). Kampus melalui pengabdian menyediakan ruang inovasi dan metodologi, sedangkan desa memfasilitasi, menyediakan ruang implementasi dan data yang riil. Seperti model kolaborasi kampus dan desa melalui skema Tri Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Mekanismenya mahasiswa dan dosen turun kelapangan untuk melakukan sensus berbasis digital dalam hal penyusunan data desa presisi dalam rangka mengatasi data desa yang lemah. Sedangkan keberadaan kampus tidak hanya memberikan solusi sesaat terhadap permasalahan desa, tetapi juga memberikan solusi permanen bagi struktur kelembagaan desa. Keberadaan kampus menciptakan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar, terutama melalui pembentukan bisnis lokal yang melayani siswa dan penduduk kampus. Tak cuma menekankan pada manfaat ekonomi, tetapi solusi kelembagaan jangka panjang untuk struktur desa. Pembuat kebijakan lokal harus fokus pada peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan yang berkontribusi pada pembangunan kelembagaan berkelanjutan di desa (Kunaifi et al., 2022).

Policy Brief sebagai Instrumen Kebijakan terhadap pemerintah. *Policy brief* berisi rekomendasi kebijakan peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi data pembangunan, dan riset kolaboratif desa kampus. Pembangunan pedesaan kerap mengalami kendala akibat kesenjangan kompetensi digital serta ketidakakuratan data. Oleh karena itu, diperlukan upaya integratif yang menghubungkan perguruan tinggi sebagai pusat keilmuan dengan praktisi desa melalui pemanfaatan platform digital. Sinergi antara sumber daya akademik dan pelaku desa yang

dijalankan secara efektif diyakini mampu meningkatkan kualitas data dan kapasitas literasi digital masyarakat, sehingga dapat mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan serta memperkuat kemandirian dan kemampuan masyarakat desa (Santosa et al., 2024). Terdapat tiga rekomendasi kebijakan utama yang dapat diajukan, yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia desa, penerapan digitalisasi data pembangunan, serta pengembangan kolaborasi antara kampus dan desa dalam aktivitas penelitian. Penguatan kapasitas SDM dilakukan melalui transformasi digital, sementara digitalisasi data pembangunan diarahkan untuk meningkatkan transparansi. Di sisi lain, kerja sama kampus desa dalam kegiatan penelitian didorong sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam pelaksanaan program pembangunan secara lebih efektif (Pujiyanto & Bratamanggala, 2024).

Data primer berdasarkan hasil diskusi dengan wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD) dengan delapan responden kunci (*key informants*) yang memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan kelembagaan dan tata niaga beras, meliputi pengurus Gapoktan, BUMDes, penyuluh pertanian, dan perwakilan pemerintah desa. Terdapat empat strategi utama yang menjadi prioritas dalam penguatan kelembagaan petani tata niaga beras Desa Rias diantaranya-Nya penguatan kapasitas SDM kelembagaan, reformasi tata kelola kelembagaan, akses pembiayaan, dan kemitraan berkelanjutan.

Tabel 1. Prioritas alternatif pada kriteria penguatan kelembagaan petani Desa Rias

| Kriteria Intervensi | Bobot Prioritas | Fokus Solusi |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Akses Pembiayaan | 0,4685 | Pusat serap gabah, manajemen kualitas |
| Kriteria Intervensi | Bobot Prioritas | Fokus Solusi |
| Kemitraan Berkelanjutan | 0,2772 | Kontrak Penjualan kolektif |
| Penguatan Kapasitas SDM | 0,2240 | Model bisnis BUMDes, manajemen |

| | | |
|---|--------|--|
| Kelembagaan Reformasi Tata Kelola Kelembagaan | 0,0303 | kualitas Konsolidasi volume, trust anggota, akses formal |
|---|--------|--|

Sumber: Data yang telah diolah, 2025

Berdasarkan tabel 1, akses pembiayaan merupakan titik kendala struktural utama dalam tata niaga beras Desa Rias dengan bobot prioritas sebesar 0,47. Keterbatasan pembiayaan menghambat kelembagaan petani dalam menyerap gabah, mengelola stok pascapanen, dan menunda penjualan hingga harga menguntungkan. Penelitian ini sejalan dengan (Lestari et al., 2019) yang menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi petani dan pakar salah satunya adalah keterbatasan modal dan kurangnya anggaran. Agustin et al., (2025) juga menyatakan bahwa akses pembiayaan merupakan prasyarat utama bagi peningkatan efisiensi rantai pasok dan posisi tawar petani. Dalam konteks agribisnis padi, pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai modal produksi, tetapi juga sebagai instrumen pengendali waktu dan volume pemasaran. Tanpa akses pembiayaan formal, petani cenderung menjual gabah segera setelah panen kepada tengkulak, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan nilai tambah dalam rantai pasok (Nurmahdy et al., 2020).

Strategi kemitraan berkelanjutan menempati prioritas kedua dengan bobot prioritas sebesar 0,28, yang mengindikasikan pentingnya hubungan pasar jangka panjang dalam meningkatkan nilai tambah produk. Kerja sama dengan BULOG di Desa Rias telah memberikan stabilitas harga, namun belum sepenuhnya mendorong hilirisasi dan pengembangan beras bernilai tambah. Untuk mendorong transformasi ekonomi desa, kelembagaan perlu mengalihkan orientasi dari penjualan gabah kering panen (GKP) menuju produksi beras premium yang mampu menyediakan margin keuntungan lebih tinggi. Penelitian Romadhona et al., (2022) menunjukkan bahwa kemitraan berbasis kontrak kolektif mampu meningkatkan margin keuntungan petani dan memperkuat stabilitas pemasaran. Widiarta et al., (2025) menegaskan bahwa integrasi vertikal berbasis kelembagaan mampu meningkatkan efisiensi tata niaga sekaligus memperkuat daya saing agribisnis pedesaan. Hilirisasi beras desa melalui kelembagaan petani memungkinkan petani

berperan tidak hanya sebagai produsen bahan baku, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam rantai nilai.

Penguatan kapasitas SDM kelembagaan menempati urutan ketiga dengan bobot prioritas sebesar 0,22, yang menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan manajerial masih menjadi penghambat transformasi kelembagaan petani. Oleh sebab itu, diperlukan investasi pengetahuan pada aspek manajemen bisnis, akuntabilitas keuangan, legalitas kontrak, serta pengelolaan BUMDes sebagai lembaga mitra strategis (Hariadi & Perdana, 2025). Temuan ini sejalan dengan Saputra & Rahman (2024) yang menekankan pentingnya literasi manajemen, keuangan, dan digital bagi pengurus kelembagaan dalam menghadapi dinamika pasar agribisnis. Selain pelatihan teknis dan manajerial, pendampingan berkelanjutan oleh penyuluh pertanian dan akademisi berperan penting dalam memperkuat kapasitas adaptif kelembagaan. Qomariyah et al., (2025) menunjukkan bahwa proses pendampingan jangka panjang dapat meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam memecahkan masalah kompleks, memperluas jaringan kemitraan, serta mengimplementasikan inovasi kelembagaan secara lebih terarah dan terukur.



Gambar 1. Kegiatan penandatanganan kerja sama (IA) di Desa Rias Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan



Gambar 2. Focus group discussion (FGD) dan penyusunan *policy brief* di Desa Rias Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat di Desa Rias berhasil memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa melalui kegiatan FGD dan penyusunan *policy brief*. Pendekatan kolaboratif ini meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberikan arah baru bagi pembangunan desa berbasis data dan partisipasi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Rias, kelompok tani, mahasiswa dan dosen Prodi Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Bangka Belitung, serta seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. N., Ainiyah, Z., Agustin, M. A., Agustina, P. D., Franciska, C. A. (2025). Analisis Efektivitas Kelembagaan dalam Pengembangan Ekonomi Pertanian di Kecamatan Jogoroto. *Indonesia Journal Business Economic*, 1(2), 38–53.
- Hariadi, U., & Perdana, P. (2025). Transformasi Digital dan Pengembangan SDM Pertanian: Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pertanian Agros*, 27(2), 257–266.
- Haryono, T., & Wibowo, A. (2023). Kebijakan Berbasis Bukti untuk Pembangunan Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kebijakan Publik*, 9(1), 23–34.
- Kunaifi, A., Dwiaryanti, R., & Zuhriyah, L. (2022). Eksistensi Kampus dan Dampak Langsung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Ekosiana*, 9(2), 112–126.
- Lestari, P., Evahelda, E., & Pranoto, Y. S. (2019). Strategi Pengembangan Lada Putih dalam Mewujudkan Kawasan Sentra Produksi Nasional di Kabupaten Bangka Selatan. *Journal of Integrated Agribusiness*, 1(1), 27–37.
- Murdyantoro, E., Wisnu, A., & Nugraha, W. Wardhana AW, Fadli A, Zulfa MI. A Review of Lora Technology and Its Potential Use for Rural Development in Indonesia.
- Nopriansyah, L., Agustina, F., & Setiawan, I. (2021). Dampak Kebijakan Harga Beli Pemerintah terhadap Permintaan dan Penawaran Gabah di Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 3(2), 130–143.
- Nugraha, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Perguruan Tinggi dalam Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Nusantara*, 3(4), 99–110.
- Nurmahdy, A. I., Machfud, M., & Syuaib, M. F. S. (2020). Kinerja Rantai Pasok Beras di Kabupaten Karawang. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 6(2), 325.
- Pujijanto, R., & Bratamanggala, R. (2024). Digital Transformation in Villages: Its Impact on Human Resource Management and Community Empowerment. *Asian Journal Social Humanity*, 3(3), 673–679.
- Romadhona, I., Dewi, T. R., & Wardani, I. (2022). Pengaruh Kemitraan terhadap Pendapatan Usahatani Padi. *AGRISAINTELIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 6(2), 130–138.
- Santosa, I., Rokhman, A., & Aisyah, D. D. (2024). The Raising Digital Literacy: An Alternative for Empowering Rural Communities. *Social Science Human Research Bull*, 1(7).
- Saputra, R., & Rahman, D. (2024). Manajemen Pelatihan dalam Penguatan Kelompok Tani pada Pelaku Agribisnis Inklusif. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 10317–10326.
- Setianingrum, N., Fitria, N., Omega, R. K., & Chofsah, Z. A. (2024). Sinergi Triple Helix dalam Upaya Meningkatkan Kualitas SDM di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(10), 77–82.
- Sulastri, D., & Purnama, E. (2022). Evaluasi Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Pembangunan Desa. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 12(3), 201–13.

Qomariyah, I. N., Kumala, S. L., Utami, I. N., Sholih, A. M., Kusumo, J. I., & Amrullah, F. A. (2025). Penguatan Kelembagaan sebagai Strategi Mendukung Adopsi Teknologi Sensor Budidaya Otomatis. *Aksiologi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(4), 496–505.

Widiarta, I. P. G. D., Andika, R., Aini, Q., Agung, A. P., & Qamara, C. (2025). Strategi Peningkatan Daya Saing Agribisnis Madu Kelulut melalui Inovasi Pemasaran dan Hilirisasi Produk. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi*, 1(4), 245–53.